
Research Article

Gender Inequality: Dampaknya Terhadap Pendapatan Per Kapita (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia 2011-2019)

Cita Puspita Sari*

BPS – Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Article history:

Submission Maret 2021

Revised April 2021

Accepted April 2021

*Corresponding author:

E-mail:

citapuspita88@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

Gender Inequality is a classic problem in various countries, especially in developing countries like Indonesia. Gender inequality in various fields is considered to hinder economic growth. Slowing economic growth is considered to have a negative impact on income, both at the national level and the per capita level. Researchers are interested in examining per capita income as a proxy for economic growth. Per capita income is a measure of community welfare that is most often used by the government. This study aims to examine the description of gender inequality and per capita income in Indonesia, and analyze the impact of gender inequality on per capita income in Indonesia. The results of descriptive analysis show that there are still gender disparities in all provinces throughout Indonesia in 2011-2019. Furthermore, based on the results of the inference analysis using panel data, this study concludes that gender inequality simultaneously has a significant effect on per capita income. Gender inequality variables that have a partial effect include wages for women workers, women's labor force participation, and gender development.

Keywords: *gender, inequality, wage, women, gdp, percapita.*

Pendahuluan

Gender inequality (ketimpangan gender) adalah masalah klasik yang terjadi di seluruh dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Gender tidak sama dengan kodrat. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang dianggap pantas berdasarkan norma masyarakat (BPS, 2019).

Stigma sebagai *konco wingking*, membuat perempuan cenderung memiliki hak lebih sedikit daripada laki-laki dalam pekerjaan, pendidikan, politik, dan ekonomi. Hal ini mengakibatkan

perempuan sulit mengembangkan potensinya dalam berbagai bidang. Ketimpangan jenis kelamin ini dapat menyebabkan pembangunan tidak dapat mencapai potensi maksimalnya (BPS, 2019).

Ketimpangan gender dinilai dapat menghambat perekonomian (Karoui & Feki, 2015). Pertumbuhan ekonomi yang melambat tentu berdampak negatif pada pendapatan, baik di level nasional, regional, maupun level per kapita.

Di Indonesia, *gender inequality* terbukti berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan

How to cite:

Sari, C. P. (2021). Gender Inequality: Dampaknya terhadap Pendapatan Per Kapita (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia 2011-2019). *Berdikari :Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*. 1(1), 47-52. doi: 10.11594/jesi.01.01.06

ekonomi (Mawftiq, 2014). Ketimpangan gender terjadi pada pendidikan, lapangan pekerjaan, akses atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik (Sitorus, 2016). Ketimpangan gender dianggap sebagai gap pada capaian kapabilitas dasar yaitu kesehatan, pendidikan, pendapatan per kapita.

Ketimpangan gender pada sumber daya dan akses politik terbukti menghambat roda pembangunan (Harahap, 2014). Rendahnya kesetaraan gender dianggap membatasi produktifitas, pertumbuhan ekonomi, dan efisiensi pembangunan. Perempuan dianggap menanggung beban paling berat akibat ketimpangan yang terjadi (Sitorus, 2016). Namun, pada dasarnya ketimpangan gender merugikan semua orang. Jadi ketimpangan gender tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga merugikan negara secara keseluruhan.

Namun, tidak semua peneliti sepakat dengan pernyataan tersebut. (Bertay et al., 2020) dalam studinya menyatakan bahwa *gender equality* yang lebih tinggi justru akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, (Nazmi & Jamal, 2018) dalam studinya juga menyebutkan bahwa pembangunan gender tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan gender hanya akan mendorong pembangunan manusia, bukan pertumbuhan ekonomi.

(Susiani, 2011) dalam penelitiannya di Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, juga menghasilkan fakta bahwa *gender inequality* pada bidang pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja tidak memengaruhi perekonomian. Pendapat ini sejalan dengan (Aurora, 2012) yang menyatakan bahwa peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih baik tidak memengaruhi kontribusi perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pro kontra mengenai adanya pengaruh *gender inequality* terhadap perekonomian menjadi motivasi bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut. Beberapa penelitian sudah pernah dilakukan di Indonesia. Akan tetapi baru sebatas pada pengaruh *gender inequality* terhadap pertumbuhan ekonomi, belum sampai pendapatan per kapita. Padahal, pemerintah menggunakan pendapatan per kapita sebagai tolak ukur utama kesejahteraan ekonomi penduduk (Arsyad, 2010).

Pendapatan per kapita merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan standar hidup atau *standard of living* (Masniadi, 2012). Perbedaan pendapatan per kapita mencerminkan perbedaan kualitas hidup.

Faktor utama yang mempengaruhi perbedaan *standard of living* (dalam hal ini pendapatan per kapita) adalah produktifitas pekerja (Mankiw, 2006). Pertumbuhan ekonomi tidak lepas kaitannya dengan pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk dinilai berpengaruh negatif terhadap pendapatan per kapita (Masniadi, 2012).

Perbedaan pendapatan juga bisa diakibatkan oleh perbedaan jenis kelamin (BR Arfida, 2003). Pekerja perempuan sering menghadapi diskriminasi dan stagnasi partisipasi dalam dunia kerja, salah satunya terkait dengan upah (Vibriyanti, 2013).

Republika merangkum pernyataan (Jalal, 2015), selaku Kepala BKKBN, bahwa bias gender dalam ketenagakerjaan di Indonesia masih tinggi. Hal ini ditandai dengan diskriminasi dalam sistem pengupahan, kesempatan kerja, jenis pekerjaan, kesempatan karir, dan sistem perlindungan kesehatan.

Untuk mengukur keberhasilan pengambilan kualitas hidup manusia, UNDP telah menyusun *Human Development Index*, atau yang biasa disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Seiring dengan merebaknya isu kesetaraan gender, UNDP pun menyusun formula baru untuk mengakomodasi perspektif gender yaitu *Gender Development Index* atau Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan *Gender Empowerment Measure* atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan seluruh negara di dunia. Terbukti dengan dimasukkannya tujuan kesetaraan gender dalam rencana aksi global, *Sustainable Development Goals* (SDG's). SDG's ini disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Salah satu tujuan pentingnya adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

(BPS, 2019) menyebutkan beberapa target SDG's antara lain mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan

anak perempuan di mana saja serta memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, (Yem-bise, 2018) dalam buku Profil Perempuan Indonesia, menyebutkan bahwa peran perempuan dalam pembangunan meliputi peran reproduktif, produktif, dan sosial. Tuntutan peran produktif perempuan dalam berbagai profesi terus disuarakan agar perempuan dapat bermitra sejajar dengan laki-laki dalam berbagai bidang.

Berdasarkan kajian literatur, peneliti menggunakan IPG, IDG, upah perempuan, dan partisipasi angkatan kerja perempuan sebagai variabel independen yang terkait dengan gender. Ditambah dengan variabel IPM dan laju pertumbuhan penduduk sebagai variabel kontrol. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak *gender inequality* terhadap pendapatan per kapita di Indonesia.

Metodologi Penelitian

Analisis dampak *gender inequality* terhadap pendapatan per kapita menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa gabungan antara *cross section* dan *time series*, atau disebut juga data panel. Data yang digunakan adalah data tahun 2011-2019 untuk 33 provinsi se-Indonesia. Data yang digunakan berasal dari BPS antara lain pendapatan per kapita riil, IPG, IDG, upah perempuan, dan partisipasi angkatan kerja perempuan, IPM, dan laju pertumbuhan penduduk.

Analisis menggunakan dua metode untuk mencapai tujuan penelitian. Metode pertama adalah analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran *gender inequality* dan pendapatan per kapita. Dilanjutkan dengan analisis inferensia menggunakan regresi data panel. Data panel memberikan lebih banyak informasi, variasi, keefisienan, dan sedikit kolinieritas antar variabel sehingga cocok digunakan untuk

mempelajari dinamika perubahan (Gujarati, 2004).

Model penelitian kita adopsi dari riset (Karoui & Feki, 2015) dengan pengembangan dari teori dan literatur sehingga diperoleh:

$$GDP_KPT_{it} = \beta_0 + \beta_1 IDG_{it} + \beta_2 IPG_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 TPAK_{it} + \beta_5 UPAH_{it} + \beta_6 GROWTH_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

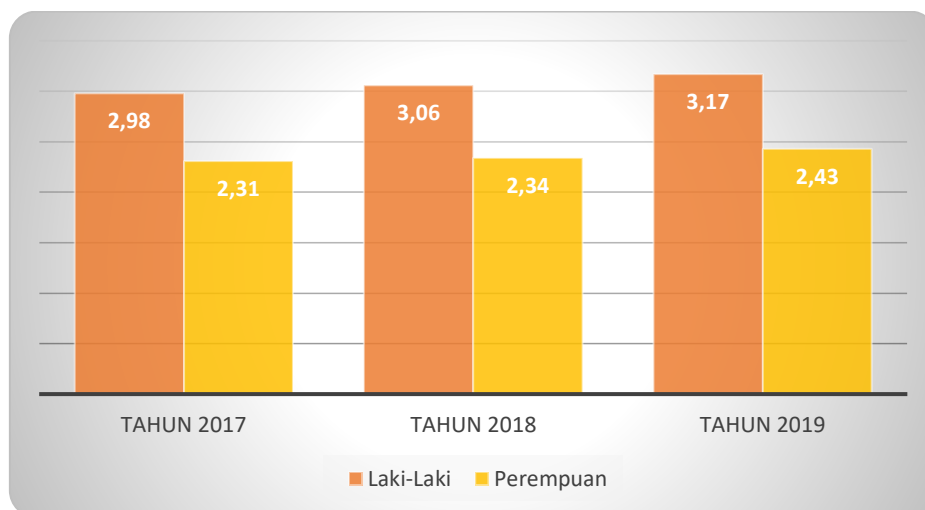
β_0	: intersep
β_1, \dots, β_6	: slope
e	: <i>error term</i>
t	: tahun 2011-2019
I	: provinsi di Indonesia
GDP_KPT	: pendapatan/kapita (juta rp)
IDG	: Indeks Pembangunan Gender
IPG	: Indeks Pemberdayaan Gender
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)
UPAH	: Rata-rata upah buruh perempuan (juta rp)
GROWTH	: Pertumbuhan penduduk

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Gender Inequality Kaitannya dengan Pendapatan Per Kapita di Indonesia

Selama tahun 2011-2019 tercatat bahwa ketimpangan pendapatan terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Rata-rata pendapatan per kapita sebesar 36,98 juta per tahun atau 3 jutaan per bulan. Menariknya, pendapatan per kapita tertinggi di DKI Jakarta (mencapai 174,13 juta rupiah) dan terendah di Nusa Tenggara Timur (hanya 9,67 juta). Terlihat gap yang sangat besar mencerminkan ketimpangan upah yang signifikan.

Gender inequality nyata terjadi pada dunia kerja. Rata-rata partisipasi angkatan kerja perempuan hanya 51,7 persen. Jauh di bawah laki-laki yang partisipasi kerjanya di atas 80 persen. Stigma bahwa laki-laki bertugas mencari nafkah dan perempuan mengurus rumah menjadi salah satu penyebab banyak perempuan memilih tidak bekerja.



Sumber: Data Sakernas 2017-2019, BPS (diolah)

Gambar 1. Ketimpangan Upah Buruh Laki-Laki dan Perempuan di Indonesia

Pada tahun 2019 perempuan yang bekerja sebagai buruh di Indonesia dibayar rata-rata 2,4 juta rupiah. Berbeda dengan buruh laki-laki yang rata-rata dibayar 3,2 juta pada tahun yang sama. Ketimpangan upah ini telah terjadi sepanjang tahun. Tidak pernah ada data yang menampilkan kondisi sebaliknya. Masyarakat menganggap upah laki-laki lebih tinggi dari perempuan sebagai hal yang lumrah. Anggapan laki-laki sebagai pencari nafkah sehingga pantas untuk dibayar lebih tinggi dibanding perempuan.

Menilik lebih jauh di 33 provinsi di Indonesia, upah buruh perempuan terlihat cukup bervariasi. DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat upah buruh perempuan tertinggi. Rata-rata buruh perempuan disana dibayar hingga 3,9 juta rupiah per bulan. Jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Sulawesi Barat yang hanya dibayar rata-rata 1,6 juta rupiah. Rata-rata upah buruh perempuan di Sulawesi barat bahkan tidak mencapai separuh dari rata-rata upah buruh perempuan di DKI Jakarta.

Ketimpangan upah buruh paling memengaruhi pendapatan per kapita

Berdasarkan analisis regresi data panel, upah buruh perempuan tercatat sebagai variabel yang paling memengaruhi pendapatan per kapita di Indonesia. Terbukti bahwa ketimpangan upah buruh berdampak negatif terhadap

nilai pendapatan secara nasional (GDP) maupun per kapita (GDP per kapita).

Dalam kenyataannya, meskipun selalu terjadi kenaikan upah buruh dari tahun ke tahun, tetapi upah yang diterima oleh perempuan selalu lebih rendah daripada laki-laki. Padahal telah ada kebijakan anti diskriminasi upah antara laki-laki dan perempuan, yaitu UU Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100. Dilansir dalam *World Economic Forum* tahun 2018, tercatat rata-rata pekerja perempuan di dunia masih dibayar sebesar 63 persen dari upah laki-laki.

BPS pun mencatat kesenjangan upah antara buruh laki-laki dan perempuan di Indonesia semakin melebar dari tahun ke tahun. BPS menyebut kesenjangan upah karena adanya anggapan perempuan kurang berkontribusi dalam pekerjaan. Perempuan cenderung ditempatkan pada posisi yang bernilai rendah.

Kesenjangan upah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita sejalan dengan hasil penelitian oleh (Vibriyanti, 2013). Disebutkan bahwa diskriminasi upah laki-laki dan perempuan berimplikasi negatif pada pencapaian pertumbuhan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh (Jalal, 2015) dalam Republik yang menyebutkan bahwa bias gender dan diskriminasi upah pada pekerja perempuan berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi.

Ketimpangan Partisipasi Angkatan Kerja Memengaruhi Pendapatan Per Kapita

Selanjutnya, variabel *gender inequality* yang terbukti signifikan memengaruhi pendapatan per kapita adalah TPAK perempuan. Hasil ini sesuai dengan (Sitorus, 2016) yang menyebutkan bahwa *gender inequality* menghambat pertumbuhan ekonomi. (Vibriyanti, 2013) menambahkan bahwa partisipasi perempuan dalam dunia kerja minim karena beberapa memilih mengurus rumah tangga. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak bisa mencapai potensi maksimal sehingga pendapatan per kapita tidak optimal.

Ironisnya, partisipasi angkatan kerja perempuan yang rendah ditambah dengan fakta miris bahwa banyak perempuan bekerja tetapi tidak dibayar. Sesuai dengan pernyataan (Cuberes & Baque, 2012) bahwa mayoritas pekerja keluarga adalah perempuan yang seringkali tidak dibayar.

Indeks Pembangunan Gender Memengaruhi Pendapatan Per Kapita

Beralih ke variabel *gender inequality* yang lain yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG). Dalam penelitian ini, IPG terbukti berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita. Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya (Sitorus, 2016).

Semakin tinggi pembangunan gender di suatu wilayah, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di sana. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi tidak hanya didorong oleh keberhasilan peningkatan kapabilitas dasar (kesehatan, pendidikan, standar hidup layak) laki-laki, tetapi juga penduduk perempuan. Semakin rendah ketimpangan gender, maka semakin maju kinerja perekonomian di wilayah tersebut. Ini akan memberikan implikasi yang positif terhadap pendapatan per kapita.

Menariknya, pemberdayaan gender yang merupakan salah satu variabel *gender inequality* ternyata tidak signifikan memengaruhi pendapatan per kapita. Keterwakilan perempuan di parlemen dan keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional di Indonesia terbukti tidak memengaruhi pendapatan per kapita.

Hasil ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari (Post & Bryon, 2015). Disebutkan bahwa begitu perempuan mendapatkan jabatan manajerial, mereka dapat meningkatkan laba atau profit perusahaan. Yang artinya dalam skala makro dapat berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian.

Salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam parlemen sudah dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi keterwakilan perempuan di kursi DPR sebanyak 30 persen. Keterwakilan perempuan dalam parlemen diharapkan dapat memberikan otoritas pada perempuan untuk membuat kebijakan yang berpihak pada pencapaian hak-hak perempuan, khususnya terkait kesetaraan gender.

Akan tetapi, sampai saat ini keterwakilan perempuan dalam parlemen dianggap sebatas formalitas. Tidak lebih dari sekedar lipstik politik. Penelitian ini membuktikan bahwa pemberdayaan perempuan tidak mempengaruhi kinerja perekonomian.

Conclusion

Penelitian ini membuktikan bahwa masih terdapat *gender equality* di seluruh provinsi se-Indonesia dari tahun 2011-2019. *Gender equality* terlihat dari aspek diskriminasi upah buruh, partisipasi angkatan kerja, pembangunan gender, dan pemberdayaan gender.

Secara simultan *gender inequality* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita. Variabel *gender inequality* yang berpengaruh secara parsial antara lain upah buruh perempuan, partisipasi angkatan kerja perempuan, dan pembangunan gender. Sementara itu, pemberdayaan gender tidak signifikan karena keterwakilan perempuan dalam parlemen maupun dalam jabatan profesional masih banyak dianggap formalitas sehingga belum berdampak signifikan.

Ketimpangan gender merupakan hambatan besar dalam perekonomian. Diperlukan keterlibatan pemerintah dalam rangka penurunan *gender inequality* demi peningkatan kesejahteraan penduduk serta pencapaian tujuan pembangunan global (SDG's).

Demi memperkaya analisis, penelitian ke depan bisa dikombinasikan dengan indikator

kesejahteraan lain, seperti *gini ratio* dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian terhadap variabel *gender inequality* juga dapat dikembangkan sesuai dengan fenomena dan ketersediaan data. Bisa jadi variabel pemberdayaan gender di masa mendatang signifikan memengaruhi pendapatan per kapita seiring dengan peningkatan kontribusi perempuan dalam ekonomi dan politik.

Lebih jauh, semoga hasil penelitian ini dapat berkontribusi menambah khasanah literatur terkait *gender inequality* serta membuka wawasan bahwa *gender inequality* tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga merugikan seluruh penduduk Indonesia. Ketimpangan gender berdampak negatif terhadap pendapatan, baik pada level nasional, regional, maupun per kapita.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincoln. (2020). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Aurora, R (2012), "Gender Inequality, Economic Development, and Globalization: A State Level Analysis of India". *College of Business, Tennessee State University. The Journal of Developing Areas*, Vol.46, No.1.
- Bertay, Ata Can, Ljubica Dorbevic, & Can Serv-er. (2020). "Gender Inequality and Economic Growth: Evidence from Industry- Level Data", IMF Working Paper 20/119. Washington: International Monetary Fund."
- BPS. (2019). *Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender*. Jakarta: BPS
- BR, Arfida. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Cuberes, David and Marc Teignier-Baque. (2012). "Gender Inequality and Economic Growth". *World Development Report 2012*, Gender Equality and Development.
- Gujarati, DN. (2004). *Basic Econometrics (4th) Edition*. New York: McGraw Hill.
- Handoko Hadoyanto, & Bambang A. Hermanto. (2011). "Pengaruh Kesetaraan Gender terhadap Perekonomian Daerah". JEPP Volume 04 Nomor 01.
- Harahap, Rahmi Fuji Astuti. (2014). *Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Jalal, Fasli (2015). <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/03/nj77xl-bias-gender-ketenagakerjaan-perempuan-di-indonesia-masih-tinggi>. Diakses 3 Desember 2020.
- Karoui, Khayria and Rochdi Feki. (2015). "The Effect of Gender Inequality on Economic". Springer Science + Business Media New York. New York: Cross Mark
- KPPA dan BPS. (2018). *Profil Perempuan Indonesia*. Jakarta: KPPA.
- Mankiw, N. Gregory. (2006). *Teori Makro ekonomi Edisi Keenam*. Terjemahan. Jakarta: Erlangga.
- Masniadi, Rudi. (2012). "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tabungan, dan Investasi terhadap Tingkat Pendapatan per Kapita Indo-nesia". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 10 No.1 Juni 2012.
- Mawftiq, Rarasati. (2014). *Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2005-2011*. Tesis. Universitas Negeri Surakarta.
- Nazmi, Liza dan Abd Jamal. (2018). "Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah* Vol.3 No. 4 No-vember 2018: 740-750.
- Susiaini, Handoko Hadoyanto, & Bambang A. Hermanto. (2011). "Pengaruh Kesetaraan Gender terhadap Perekonomian Daerah". JEPP Volume 04 Nomor 01.
- Sitorus, Agnes Vera Yanti (2016.) "Dampak Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". *Sosio Informa* Vol. 2, No. 01, Januari-April Tahun 2016, Kesejahteraan Sosial.Aktaria,
- Vibriyanti, Deshinta. (2013). "Ketimpangan Gender dalam Partisipasi Ekonomi: Analisis Data Sakernas 1980-2013". *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 8 No. 1 Tahun 2013.